



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN,
PEMANTAUANDAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu dilakukan dukungan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;

b. menyusun ...

- b. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP);
 - c. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - b. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. menyusun laporan evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

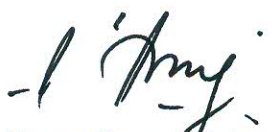
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmaniatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Ekonomi.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.
Sekretaris : Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.
Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Pendidikan;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Transportasi;
5. Direktur Perumahan dan Permukiman;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi;
7. Direktur Pangan dan Pertanian;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Lingkungan Hidup;
10. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
12. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
13. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;

14. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
15. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
16. Sudira, S.Sos, MAP;
17. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
18. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc;
19. Rizki Yuwanita Habibah, ST;
20. Ir. M. Zainal Fatah;
21. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
22. Ira Lubis, ST, MIDP;
23. Ikhwan Hakim, ST, MST, Ph.D;
24. Ahmad Zainudin, S.Sos;
25. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, Ph.D;
26. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
27. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
28. Setyawati, ST, MNatResEcon;
29. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
30. Ir Nita Kartika, M.Ec;
31. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
32. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
33. Sularsono, SP, ME;
34. Raffi Noor, S.Si;
35. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip;
36. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
37. Anna Amalia, ST.

D. TENAGA PENDUKUNG

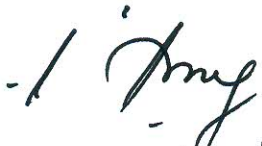
- : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Asep Supriyadi;
4. Muhamad Sulaiman;
5. Suparjo;
6. Sapto Mulyono, SE.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun